

Ketika Hujan

Dari Halaman 1

Karena itu saat ini, lanjut Dody, pihaknya akan memprioritaskan konektivitas antar-wilayah agar bantuan bisa terdistribusi merata. "Saya pikir fokus utamanya membuka semua daerah yang hari ini semua konektivitas darat belum terbuka, itu dulu, itu dulu yang diutamakan, karena ada beberapa tempat yang hari ini masih didrop dari udara, itu yang difokuskan, itu pun masih setengah mati," ujarnya. (cnni/js)

tersebut berdasarkan lima jenis kerugian.

Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta per rumah. Kedua, kerugian jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai Rp1 miliar.

Ketiga, kerugian pendapatan keluarga sesuai dengan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja.

Keempat, kerugian lahan sawah dengan kehilangan mencapai Rp6.500 per kg dengan asumsi per Ha dapat menghasilkan 7 ton. Kelima, perbaikan jalan per 1000 meter mencapai Rp100 juta. **(cnni/js)**

Naudzubillah. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa penyebab bencana ini adalah Tuhan karena telah menurunkan hujan dengan curah yang tinggi. Apakah mereka tidak takut lidahnya menjadi saksi di akhirat? Bagaimana mungkin tangan mereka yang menandatangani izin, lalu mulut mereka menyalahkan Tuhan?

Dalam Islam, bencana memang bagian dari takdir. Tapi kerusakan akibat tangan manusia adalah peringatan yang jelas tertulis: “Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia...” (QS. Ar-Rum: 41)

Dan ayat itu tidak ditujukan kepada hujan, tidak ditujukan kepada sungai, tidak ditujukan kepada cuaca, melainkan kepada mereka yang rakus dan tidak mau berhenti meski alam sudah menjerit.

Kini rakyat yang harus menanggung dosa ekologis yang bukan mereka lakukan. Rakyat yang harus mengubur harta, memeluk anak-anak mereka di pengungsian, dan menatap masa depan dengan mata yang penuh lumpur. Sementara itu, para elite masih sibuk berkelit, mencari kalimat paling indah untuk menutupi fakta paling busuk.

dan korban hilang 117 orang. Sementara itu korban luka-luka dalam bencana ini mencapai 2.564 orang di tiga provinsi tersebut. Jumlah warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbang tembus 3,3 juta jiwa. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbang. Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi pekan lalu tersebut.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor ini mencapai Rp68,67 triliun.

Perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir

Beliau menambahkan, kehadiran aparat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan percepatan pemulihan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Dengan peralatan seadanya, personel bekerja keras demi kepentingan warga. Ini adalah bentuk nyata aksi kemanusiaan Polri. Polda Sumut akan terus berada di lapangan sampai akses benar-benar pulih dan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan aman,” lanjutnya.

Polda Sumut memastikan bahwa setelah jembatan darurat ini selesai, distribusi bantuan dan aktivitas warga dapat kembali berjalan normal secara bertahap. **(A-10)**

Hidayah

melakukan upaya percepatan agar jalur darurat dapat segera digunakan masyarakat dan kendaraan darurat yang membawa bantuan.

Kabid Humas Polda Sumut menegaskan, langkah cepat semua unsur yang diterjunkan merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam membantu percepatan penanganan bencana.

“Polda Sumut tidak membiarkan masyarakat terisolasi. Hari ini, berbagai satuan kami turun langsung membangun jembatan darurat agar Pandan dan Kalangan kembali terhubung. Ini juga demi memulihkan mobilitas di Jalinsum yang merupakan jalur strategis pergerakan logistik,” ujar Kabid Humas Polda Sumut.

Sebagian besar hutan alam yang hilang pada 2024 merupakan habitat spesies langka dan tidak diindungi di Indonesia. Untuk Tahun 2025, WALHI menuntir bahwa sepanjang tahun 2025 deforestasi diproyeksikan naik setengah juta Hektar.

"Bencana yang terjadi adalah akibat inkonsistensi pemerintah dalam menjaga dan memelihara kawasan Hutan, Deforestasi masih tetap berlanjut, kita harap Hutan Indonesia dijaga dengan orang yang amanah," ungkap Ketua GMNI Medan.

Pembelajaran Ilmu Kehutanan di Indonesia bukanlah hal yang baru, tercatat ada 68 Perguruan Tinggi yang terdaftar dalam keanggotaan FORETIKA (Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia). Setiap tahun, ratusan orang dari masyarakat Indonesia mendapat gelar sarjana Kehutanan. Puluhan mungkin ratusan Guru Besar Kehutanan yang dimiliki Indonesia sampai saat ini, sayangnya pemerintah masih saja abai dalam kepentingan perguruan kawasan hutan, dengan memilih Menteri Kehutanan yang tidak konsisten dan jauh dari lingkup Rimbawan.

Andreas Silalahi, yang juga seorang sarjana Kehutanan menyatakan, seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi Presiden Prabowo.

"Bidang Kehutanan bukan bidang yang sepele, sehingga orang yang diamanatkan untuk itu juga harus kompeten, dan tanggap terhadap issue Kehutanan," sebutnya.

Untuk itu, ia pun menyarankan agar Presiden Prabowo harus cepat-cepat mengganti Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

"Begini banyak rimbawan di negeri ini yang berstatus Guru Besar dan kiprahnya di bidang kehutanan tidak diragukan. Tentu secara referensi kita minta Pemerintah harus mempertimbangkan seorang rimbawan untuk mengurus hutan Indonesia agar tetap lestari," tutup Andreas.(A-10)

Media Massa Harus Berperan

memiliki peran yang penting dalam pengolahan dan penataan kawasan hutan yang ada, mulai dari evaluasi perizinanan sampai langkah ekologis untuk merestorasi kawasan hutan, sampai sekarang tidak ada langkah bijak dan strategis yang muncul dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

"Presiden Prabowo perlu dan wajib mengkaji ulang penunjukan Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni," kata Andreas.

Ia juga mengutip statement dari Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu yang menyatakan bahwa perzinan penembangan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan sebulan sebelum bencana adalah salah satu bentuk ketidakmampuan Raja Juli Antoni dalam mewujudkan tata kelola hutan yang lestari.

"Raja Juli Antoni adalah wujud nyata dari inkonsistensi pemerintah dalam memperhatikan Kawasan Hutan Indonesia secara jangka panjang. Penetapan Raja Juli sebagai menteri hanya sekedar pemberian hadiah pasca pemilu saja, bukan fokus dalam penanganan masalah kelestarian ekosistem Hutan untuk Bangsa dan Negara," tuding Andreas.

Dan, yang paling disesalkannya, pernyataan Kementerian Kehutanan terkait kayu gelonggongan yang bukan dari pembalakan kayu liar, melainkan secara alami karena longsor.

"Hal ini tentu aneh, tidak ada kajian santifik yang diberikan KemenHut dalam pernyataan mereka. Jadi, jelas saat ini Kementerian Kehutanan dinilai tidak kompeten dalam mengurus ekosistem Hijau Indonesia," timpal Andreas.

Sebelumnya, Auriga Nusantara merilis data deforestasi di Indonesia pada 2024, disebutkan deforestasi terjadi di 428 kabupaten/kota, atau pada 83% kabupaten/kota di Indonesia yang seluruhnya berjumlah 514.

Terdapat 68 kabupaten yang memiliki deforestasi lebih dari 1.000 hektare dan 5 Provinsi di Pulau Sumatera masuk kategori 10 besar provinsi dengan deforestasi terbanyak tahun 2024.

memperbaiki drainase, membersihkan sungai, atau meniadakan para pelangang izin. Jika itu tidak beres, banjir akan terus terjadi," tambahnya.

Kritik ini menambah panjang daftar sorotan terhadap DPRD Medan yang dinilai kurang agresif mendorong solusi atas persoalan klasik kota: banjir, sampah, dan kerusakan lingkungan.

"Banjir ini adalah persoalan yang sudah berulang, banjir ini ada sudah lebih dari 20 tahun, tapi cara penanganannya yang salah," ungkapnya.

Warga kini berharap lembaga legislatif itu tidak hanya bicara, tetapi benar-benar hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

"Jangan asal bicara. Cari perhatian. Maunya bicara itu terukir menyelesaikan masalah. Jangan sekedar bunyi. Makan APBD kok nggak mikiran masalah rakyat," pungkasan. **(A-10)**

Dari Halaman 1

titik inilah penting melihat banjir Sumatera sebagai studi kasus kegagalan agenda setting, lemahnya environmental journalism, serta dominannya framing developmentalisme dalam media arus utama.

Pertama, isu illegal logging selama ini cenderung kurang mendapat penekanan dalam agenda media, meskipun dampaknya sangat besar terhadap banjir. Teori agenda setting menyebutkan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi menentukan apa yang dianggap penting. Sayangnya, isu pembalakan liar sering muncul hanya ketika sudah terjadi bencana besar. Berita-berita sebelumnya yang harusnya mengawasi aktivitas hutan secara kontinu jarang diangkat secara mendalam. Akibatnya, publik baru mengetahui kerusakan ekologis ketika banjir telah menghancurkan rumah, memutus akses, dan menelan korban jiwa. Siklus perhatian media terhadap isu lingkungan ini bersifat reaktif, bukan preventif.

Kedua, framing media cenderung menyederhanakan penyebab banjir sebagai cuaca ekstrem, bukan sebagai akibat dari struktur kekuasaan yang membiarkan illegal logging berlangsung. Banyak pemberitaan berhenti pada kalimat "curah hujan tinggi," sementara faktor hulu deforestasi, pembarian izin, lemahnya pengawasan hutan, dan kekuatan ekonomi mafia kayu sering tidak menjadi bagian utama berita. Pola framing semacam ini membuat publik melihat banjir sebagai takdir alam, bukan sebagai akibat dari tata kelola hutan yang lemah. Ini yang disebut sebagai depoliticizing environmental issues, yakni memisahkan lingkungan dari relasi kekuasaan.

Ketiga, kita perlu menyoroti lemahnya jurnalisme investigasi lingkungan di tingkat lokal. Banyak media daerah bergantung pada iklan pemerintah daerah atau perusahaan, termasuk perusahaan yang memegang konsesi hutan. Ketergantungan ekonomi ini menciptakan apa yang disebut McChesney sebagai "structural capture" media oleh kepentingan ekonomi-politik. Ketika konflik kepentingan terjadi, liputan investigatif mengenai illegal logging cenderung dilemahkan, ditunda, atau tidak pernah terbit. Dampaknya, informasi tentang kerusakan hutan tidak mengalir ke publik secara terbuka.

berulang di Medan bukan hanya akibat perilaku warga, tetapi juga buah dari ketidaktegasan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pembangunan kota.

Jaya Arjuna juga mempertanyakan sejauh mana program DPRD Medan dalam menangani isu lingkungan.

“Apa yang sudah diperbuat DPRD Medan untuk menangani lingkungan, banjir, sampah, dan yang lainnya? Adakah program-program di APBD untuk masalah ini?” ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menegaskan, banjir yang melumpuhkan kota tidak akan pernah selesai jika DPRD hanya mengingatkan masyarakat tanpa terlebih dahulu memperbaiki kinerja internal.

“Jangan hanya menyalahkan warga di pinggir sungai. Lihat dulu apakah sudah ada upaya nyata

umnya dituntut membayar UP sebesar Rp 67 miliar lebih subsidi 2 tahun penjara, sedangkan Iskandar dituntut membayar UP sebesar Rp 7 miliar lebih subsidi 2 tahun penjara.

Majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada kedua terdakwa maupun JPU KPK, untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan banding.

Dalam dakwaan disebutkan, kedua terdakwa terbukti mengatur proyek di berbagai dinas Pemkab Langkat, mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Pendidikan, Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan, hingga Kelautan dan Perikanan. Terbit disebut memberikan arahan kepada para kepala dinas mengenai pemenang proyek, sementara Iskandar berperan mengatur seluruh paket pekerjaan.

KPK mengungkapkan perusahaan pemenang tender wajib menyotir 'fee' sebesar 15,5–16,5 persen dari nilai kontrak kepada para terdakwa. Pengaturan ini dilakukan baik dalam tender, penjualan langsung, hingga berbagai proses pengadaan tahun 2020–2021. **(A-08)**

Keempat, komunikasi pemerintah mengenai pengawalan hutan masih bersifat defensif, bukan transparan. Alih-alih membuka kaca real-time kerusakan hutan, operasi pengawasan, dan rilis investigatif, komunikasi publik sering hanya berupa pernyataan umum bahwa “penegakan hukum telah dilakukan”. Padahal dalam teori public information model, pemerintah seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, bukan sekadar komunikasi satu arah yang bersifat seremonial. Ketika data tidak dibuka, publik kehilangan kemampuan untuk melakukan social accountability, sementara pelaku besar tetap berada di balik bayang-bayang.

Kelima, sirkulasi hoaks dan misinformasi tentang bencana ekologis menunjukkan bahwa literasi media masyarakat masih rendah. Banyak narasi viral menyalahkan “hujan buatan”, “cuaca ekstrem global”, atau “doa masyarakat kurang”, sehingga menutupi penyebab struktural deforestasi. Dalam kajian komunikasi massa, ini disebut noise yang mengaburkan pesan utama: banjir adalah akibat eksploitasi hutan yang tidak terkendali. Ketika misinformasi lebih cepat viral daripada data ilmiah, publik justru kehilangan arah untuk menuntut kebijakan perbaikan.

Keenam, hubungan antara representasi media dan kebijakan publik sangat jelas. Ketika illegal logging tidak menjadi sorotan media secara kuat, tekanan publik kepada pemerintah melemah. Pada akhirnya, penegakan hukum pun cenderung berhenti pada aktor kecil, bukan pemodal besar. Hal ini menunjukkan bagaimana media berperan dalam reproduksi ketimpangan struktural melalui cara mereka membingkai isu.

Dengan demikian, banjir di Sumatera adalah cermin dari kegagalan komunikasi massa dalam membangun kesadaran ekologis, memperkuat kontrol sosial, dan mendorong reformasi kebijakan. Media harus memainkan peran yang lebih kuat melalui jurnalisme lingkungan yang kritis, investigatif, dan berbasis data. Tanpa perubahan ekologi dan perubahan cara kita berkomunikasi tentang ekologi, banjir akan terus menjadi berita musiman bukan peringatan untuk bertindak, melainkan sekadar rutinitas yang terus berulang.

dengan pidana kurungan 3 bulan.

Hakim juga menetapkan uang pengganti (UP) kerugian negara bagi Terbit Rencana sebesar Rp 6 miliar lebih, yang telah dikompensasikan dari uang rampasan yang disita penuntut umum. Terdapat kelebihan Rp 712 juta lebih yang harus dikembalikan kepada Terbit.

Sementara Iskandar diwajibkan membayar UP Rp 7 miliar lebih, yang juga telah dibayarkan sebelumnya.

Majelis menyebut hal yang memberatkan antara lain, para terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian negara, tidak memberikan perhatian kepada pembangunan Kabupaten Langkat, serta pernah menjalani pidana korupsi. Terdakwa Terbit juga dinilai berbelit-belit saat persidangan.

"Hal yang meringankan adalah sikap sopan dan penyesalan kedua terdakwa serta memiliki tanggungan keluarga," kata hakim.

Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta keduanya dihukum 5 tahun penjara. Terbit sebel-